

Paparan Kepala Bappeda



Rapat Koordinasi

Program/ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun Anggaran 2016

Pangkalan Bun, 26 April 2016



Pendahuluan

Kemiskinan dipandang sebagai permasalahan yang bersifat multidimensional dimana masing-masing dimensi akan membentuk mata rantai yang saling mempengaruhi. Paling mendasar yang menjadi sudut pandang kemiskinan adalah dimensi Ekonomi, karena dari dimensi ekonomi seseorang diukur kemiskinannya yaitu kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (sandang pangan papan kesehatan dan pendidikan).

Ketertinggalan dan keterisolasian daerah menjadi salah satu masalah yang harus di atasi guna mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, karena dengan terbukanya isolasi daerah diharapkan akan terjadi geliat pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pembangunan khususnya di Desa/Wilayah tertinggal/terpencil.

Landasan hukum dalam mencapai target penurunan tingkat kemiskinan adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota;
4. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2009 - 2013



Sumber: TNP2K 2012, BPS 2013

Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2009-2013 mengalami pasang surut. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, dari 17.800 jiwa turun menjadi 16.400 jiwa. Namun penurunan jumlah penduduk miskin di Kotawaringin Barat tidak diikuti oleh Tingkat Kemiskinan yang justru mengalami peningkatan, yaitu dari 6,87% pada tahun 2009 naik menjadi 6,97% pada tahun 2010. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 kondisi tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin terus menurun menjadi 5,44% dan 14.300 jiwa.

TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN TERHADAP PROVINSI DAN NASIONAL

◆ Nasional ■ Kalimantan Tengah ▲ Kotawaringin Barat



Sumber data : TNP2K 2012 , BPS 2014

Pada periode tahun 2009-2010, persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan. Kondisi tersebut memiliki tren yang sama dengan provinsi dan nasional pada tahun 2009-2010 yang juga mengalami kenaikan. Dari grafik diatas terlihat laju penurunan tingkat kemiskinan memiliki kecenderungan melambat. Khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat dari penurunan sebesar 0,55% tahun 2011-2012 melambat menjadi 0,2% di tahun 2012-2013.

Tujuan dan Target Program Penanggulangan Kemiskinan:

- Penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2012 sebesar 3.50%, tahun 2013: 3.00%, tahun 2014: 2,50% dan hingga 2% pada 2015 (Surat Gubernur Nomor: 050/1165/III/Bapp)
- Penurunan tingkat kemiskinan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 sebesar 6.60%, tahun 2013: 6,40%, tahun 2014: 6,20% , tahun 2015: 6,00% dan 5,90% di tahun 2016 (Target RPJMD Kab. Kotawaringin Barat).

Tujuan dan Target Program:

- Terbebasnya Kabupaten Kotawaringin Barat dari Desa terpencil dan Desa tertinggal (terbukanya isolasi dan peningkatan pembangunan di semua sektor)
- Perbaikan distribusi pendapatan melalui perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
- Peningkatan kemampuan SDM dalam upaya penguatan dan peningkatan ekonomi individu/rumah tangga miskin.

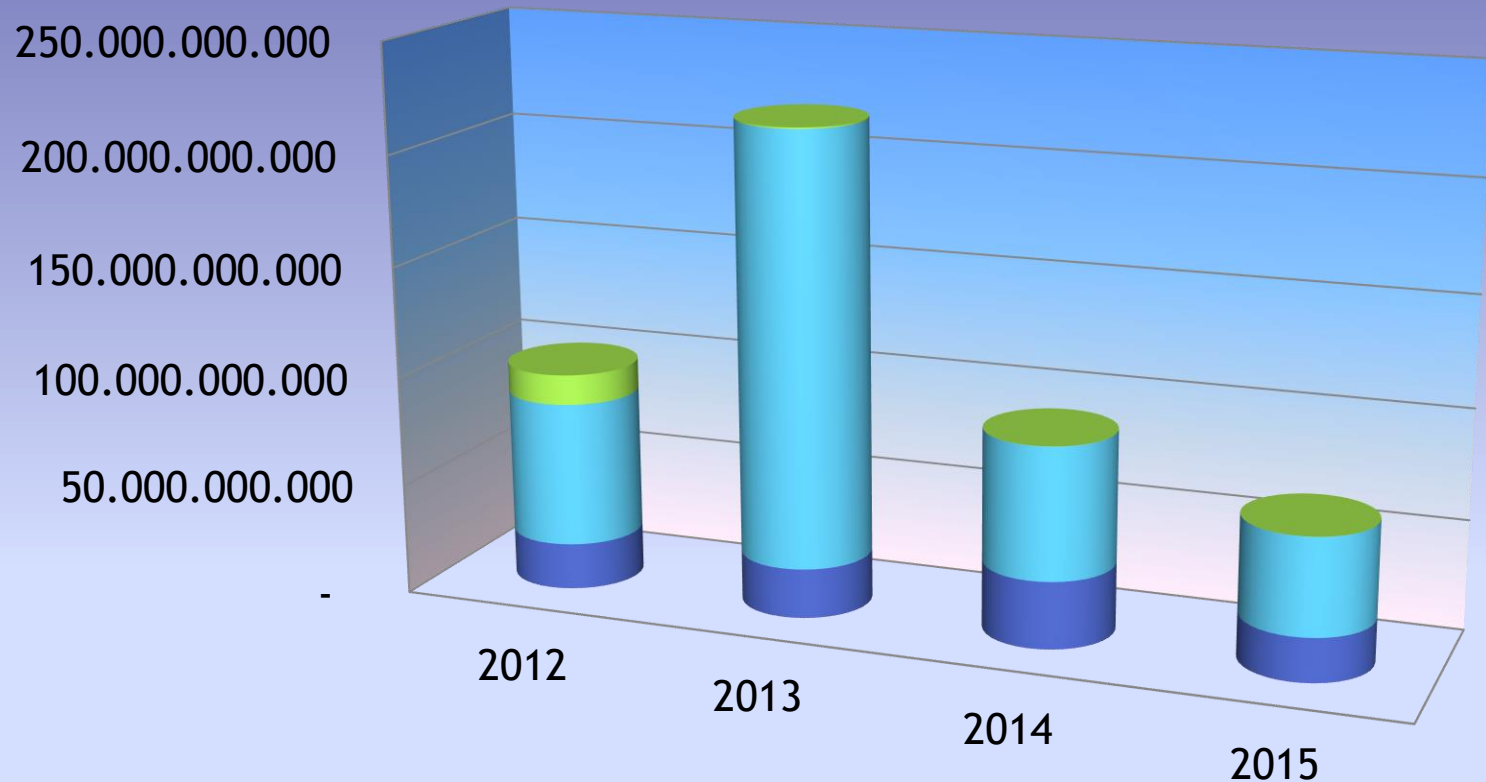
TARGET PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2015

	2012	2013	2014	2015
PROVINSI	3.50	3.00	2.50	2.00
RPJMD KOBAR	4.00	3.00	2.00	2.00
CAPIAN	5.64	5.44	5.27*	...

...* Data Sementara BPS

**PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

Alokasi Anggaran Per Kluster Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2015



	2012	2013	2014	2015
■ Kluster III	13.632.714.000	600.000.000	84.917.000	51.727.500
■ Kluster II	65.346.614.055	195.437.836.222	59.846.025.854	43.746.323.938
■ Kluster I	20.953.789.610	22.467.350.061	30.423.898.302	19.860.005.500

Jumlah Pagu dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan Per Kluster Sumber Dana APBN dan APBD di Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2014

No	Kluster	Jumlah		Pagu		Jumlah Pagu	REALISASI		
		Program	Kegiatan	APBD	APBN		% FISIK	Rp	%
1	I. PROGRAM- PROGRAM BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIALKELOMPOK SASARAN	10	21	21.828.375.302	8.824.798.000	30.653.173.302	97,39	25.140.170.756	82,01
2	II. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	36	164	44.822.018.854	15.429.524.000	60.251.542.854	96,63	56.329.273.131	93,49
3	III. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMKM)	2	4	84.917.000	-	84.917.000	100,000	83.500.600	98,33
Total Pagu		48	189	66.735.311.156	24.254.322.000	90.989.633.156	96,89	81.552.944.487	89,63

**CAPAIAN REALISASI KEUANGAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014**

REKAP

NO	SKPD	< 60 %	61% - 90%	91% -100%	TOTAL
		(Kegiatan)	(Kegiatan)	(Kegiatan)	(Kegiatan)
1	BPMD	0	2	5	7
2	DIKPORA	1	0	8	9
3	DPU	0	0	97	97
4	DINKES	0	2	6	8
5	DINSOS	0	1	5	6
6	DISBUN	0	3	9	12
7	DISHUT	2	0	3	5
8	DISTANAK	3	2	9	14
9	DKP	0	2	43	45
10	KOPPASAR	0	0	4	4
11	NAKERTRANS	0	0	7	7
12	KP2KP	0	1	5	6
13	RSUD	1	0	0	1
14	BLH	0	0	1	1
15	BULOG	0	0	1	1
JUMLAH		7	13	203	223

CAPAIAN REALISASI FISIK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014

REKAP

NO	SKPD	< 50 % (Kegiatan)	> 50% (Kegiatan)	100% (Kegiatan)
1	BPMD	0	0	7
2	DIKPORA	0	0	9
3	DPU	0	0	97
4	DINKES	0	0	8
5	DINSOS	0	0	6
6	DISBUN	0	0	12
7	DISHUT	0	2	3
8	DISTANAK	2	2	10
9	DKP	0	1	44
10	KOPPASAR	0	0	4
11	NAKERTRANS	0	0	7
12	KP2KP	0	0	6
13	RSUD	0	0	1
14	BLH	0	0	1
15	BULOG	0	0	1
TOTAL		2	5	216

Kendala Umum

- Belum tersusunya perencanaan program / kegiatan khusus untuk penanggulangan kemiskinan oleh SKPD (program / kegiatan hanya melekat).
- Sinergi dan sinkronisasi antar program belum optimal (ex: data penerima jamkesmas, raskin, bedah rumah, BLT Lansia, Beasiswa miskin, BLT penduduk dengan kecacatan belum terpadu, SKPD/kelembagaan perlu meningkatkan koordinasi).
- Masih perlunya peningkatan koordinasi antara SKPD Provinsi dengan Kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
- Kurangnya koordinasi SKPD Teknis dengan Kecamatan dan Desa lokasi yang menjadi kantong kemiskinan dan wilayah tertinggal atau terisolir dalam perencanaan program sehingga banyak program yang kurang sesuai dan tidak tepat sasaran.

Kendala khusus

- Belanja barang jasa (listrik.telp.koran.materai.penggandaan) tidak bisa direalisasikan karena bukan berbentuk barang yang diserahkan ke pihak ke tiga.
- Barang keperluan sekolah yang di butuhkan terbatas dan sulit dilelang.
- Kegiatan merupakan kegiatan di perubahan anggaran, proses penawaran melalui e-katalog tidak ada penyedia jasa yang mengajukan penawaran di karenakan waktu pelaksanaan yang singkat.
- Pihak ke tiga tidak mampu menyediakan barang sesuai dengan kontrak yang di sepakati.
- Pada saat pengadaan barang harga barang pada saat pembelian lebih murah dari pada pagu yang di tetapkan (selisih harga).
- Proposal dari masyarakat yang masuk sedikit sehingga target tidak tercapai.
- Kesalahan kode rekening belanja makan dan minum sehingga tidak dapat di SPJ.
- Evisiensi anggaran dan adanya pendanaan dari sumber dana lain.



RENCANA AKSI KEMISKINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2015

**SKPD PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015**

NO	SKPD
1	BPMD
2	DIKPORA
3	DPU
4	DINKES
5	DINSOS
6	DISBUN
7	DISHUT
8	DISTANAK
9	DKP
10	KOPPASAR
11	NAKERTRANS
12	RSUD
13	BLH

RENCANA AKSI KEMISKINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

REKAP

KLUSTER	JUMLAH	JUMLAH	DANA			JUMLAH PAGU	KETERANGAN	SKPD
	PROGRAM	KEGIATAN	APBN	APBD	LAINYA			
I. PROGRAM-PROGRAM BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIALKELOMPOK SASARAN	11	25	1.824.102.500	20.807.843.825	-	22.631.946.325	4 SKPD	DIKPORA DINKES BPMD RSUD
II. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	32	229	8.000.700.000	35.745.623.938	-	43.746.323.938	11 SKPD	DPU, NAKERTR ANS, DISHUT, BLH, DINKES, DISKOP, DINSOS, BPMD, DISTANAK, DKP, DISBUN
III. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMKM)	1	1	-	51.727.500	-	51.727.500	1 SKPD	DISKOP
TOTAL	44	255	9.824.802.500	56.605.195.263	-	66.429.997.763	13 SKPD	



**SEKIAN
TERIMA KASIH**